

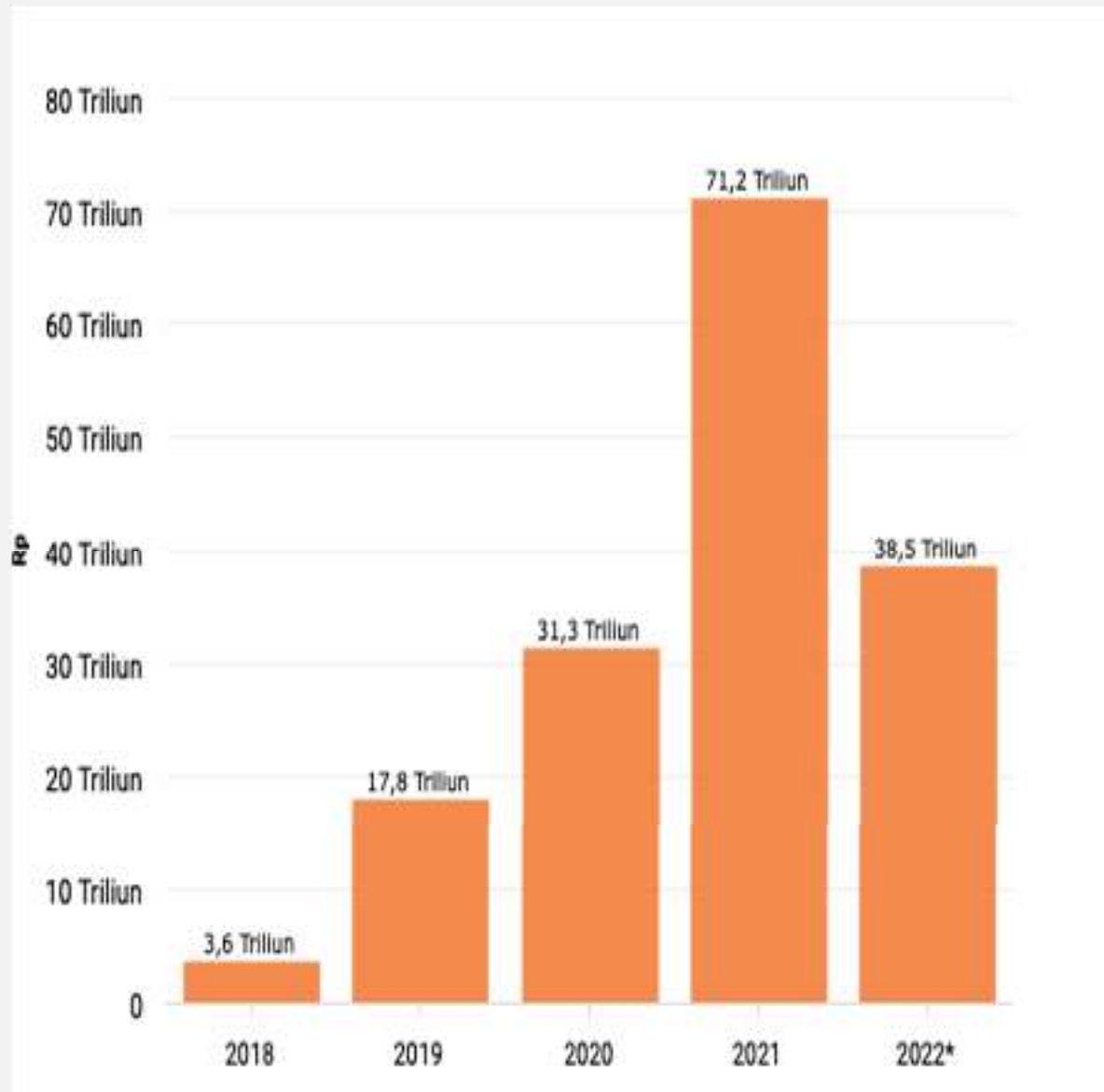
Mencermati Sistem Pencegahan Korupsi di BUMN

Dadang Trisasongko

Founder & Direktur Eksekutif Mercof Consulting

Disampaikan dalam Webinar Optimalisasi Upaya Bersih-Bersih Korupsi BUMN

Diselenggarakan oleh Visi Integritas dan Mercof Consulting, 7 Juni 2023



Sumber : DataBox

Di tahun 2023, empat BUMN (PLN, Hutama Karya, LEN, Air Nav) akan mendapatkan Penyertanan Modal Dalam Negeri sebesar : Rp. 41,3 Trilyun

Perkembangan penerapan ISO 37001 di BUMN (Sustain.id)

“Pada bulan Februari 2020, Kementerian BUMN telah menerbitkan Surat Menteri BUMN No. S-35/MBU/01/2020 perihal Implementasi SMAP di BUMN dan Surat No. S-17/S.MBU/02/2020 yang mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik negara (BUMN) membangun, menerapkan dan melakukan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebelum tanggal 17 Agustus 2020.”

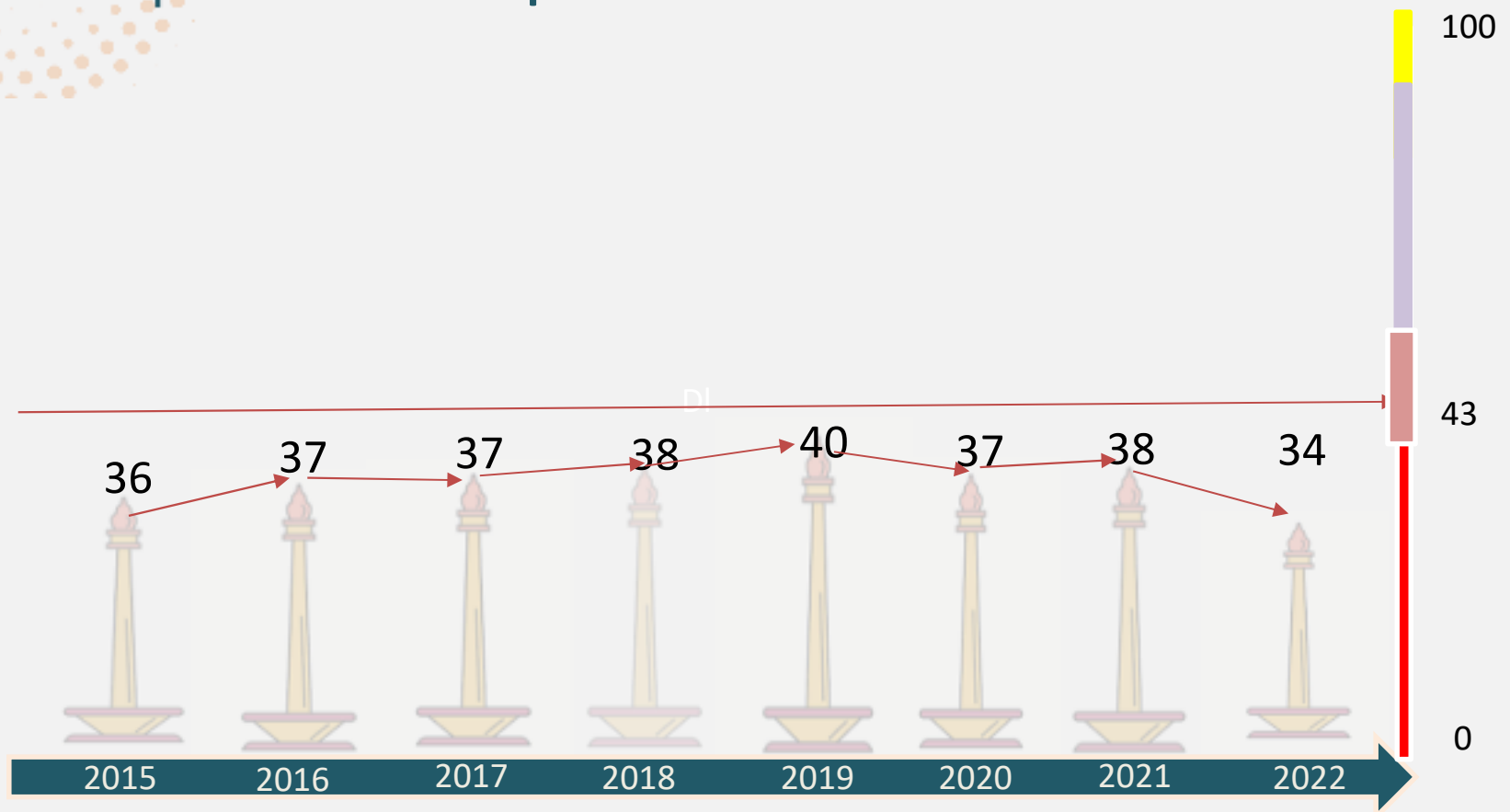
“Namun sayangnya target tersebut tidak tercapai. Kementerian BUMN mencatat per Desember 2020, baru terdapat 74 BUMN (69,15%) yang telah memiliki sertifikasi SNI ISO 37001. ada Bulan Februari 2021, terdapat peningkatan, sehingga sudah sekitar 83% BUMN yang telah memiliki sertifikasi SNI ISO 37001:2016. Data terbaru yang kami dapatkan dari sumber di Kementerian BUMN, per tanggal 31 Agustus 2021, terdapat sebanyak 98 dari 107 atau sekitar 91,59% BUMN yang telah tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.”

Penerapan program antikorupsi di 105 BUMN (2018)

(Sumber: Survei TRAC, Transparency International Indonesia tahun 2018)

DUKUNGAN PIMPINAN Berkomitmen mencegah korupsi : 46 %	PENGADUAN Menangani laporan korupsi : 58 %
SUAP & UANG PELICIN Larangan pemberian uang pelicin : 35 %	PELATIHAN Komunikasikan budaya anti korupsi : 44 %
DONASI POLITIK Larangan donasi politik : 22 %	PELAPORAN Monitoring dan evaluasi program anti korupsi : 14 %

Indikasi lemahnya sistem pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta.



Dinamika skor Corruption Perception Index Indonesia dari 2015 - 2022

Rerata skor tingkat global (180 negara) selama lima tahun terakhir : 43/100

Korupsi di lembaga negara , BUMN dan perusahaan swasta

310

ANGGOTA DPR & DPRD
(HINGGA 2022)

372

PEBISNIS
(HINGGA 2022)

Sumber : KPK

154,22

BUPATI/WALIKOTA & GUBERNUR
(HINGGA 2022)

53

PEJABAT BUMN
(HINGGA 2021)

7

KORPORASI
(Badan Hukum)
(HINGGA 2022)

21, 10, 13, 2

HAKIM, JAKSA, LAWYER, POLISI
(HINGGA 2022)



Masih ada yang ini...

Korupsi Rp 2,5 Triliun Dirut BUMN-WIKA Destiawan Soewardjono Dijebloskan ke Penjara Nyusul 4 Rekannya

Yul Adriansyah - Selasa, 2 Mei 2023 | 09:23 WIB



Pencegahan Korupsi di BUMN: Bukan sekedar standar

Sistem Pencegahan Korupsi di BUMN

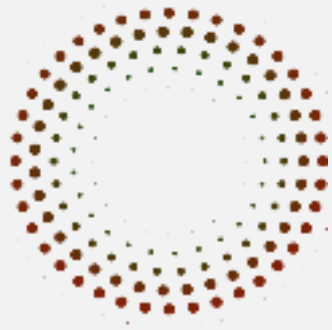
Pimpinan
yang
berkomitmen
tinggi

Lingkungan
politik yang
mendukung

Critical mass
di dalam
korporasi

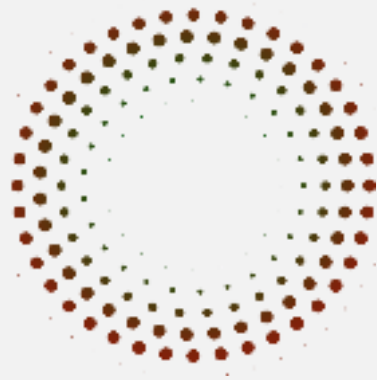
Supply chain yg
mendukung

Publik yang peduli



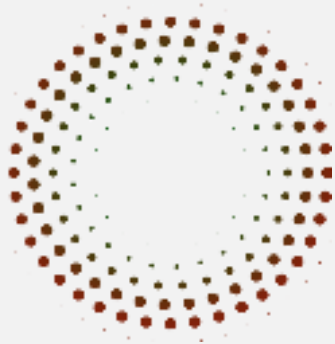
Direksi, pengawas, komisaris yang berkomitmen tinggi

Pentingnya proses seleksi para calon Direksi, Komisari/Dewan Pengawas BUMN yang transparan, terbuka dan berdasarkan uji tuntas yang dilakukan secara independen.



Memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem pencegahan korupsi

Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dan periodik terhadap penerapan sistem anti korupsi di BUMN.



Gotong Royong (*collective action*) melawan korupsi :

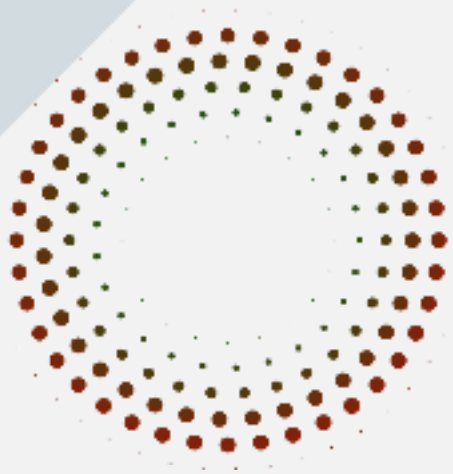
1. Di internal BUMN masing-masing
(termasuk anak perusahaan)
2. BUMN dengan para vendornya
3. Antar-BUMN



Fokus pada pengembangan SDM yang berintegritas



- Orang yang tidak berintegritas bisa mengakali sistem yang sudah baik.
- Orang-orang yang tidak berintegritas yang mengorganisasikan diri dengan baik akan menjadi ancaman bagi kelangsungan dan bahkan keberadaan sistem yang baik.



TERIMA KASIH

MERCOF Consulting

Law & Governance

<https://mercof.id>